

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka penulis mengambil kesimpulan yakni:

1. Administrasi Pendirian Persekutuan Komanditer yang baru berdasarkan Permenkumham No.17 tahun 2018 adalah calon sekutu mengumpulkan calon nama Persekutuan Komanditer sebanyak 2 nama, copy KTP disertai keterangan Sekutu Pasif atau Aktif, Copy NPWP Pribadi calon Sekutu Aktif, Copy keterangan tempat usaha dari Kelurahan setempat, maksud dan tujuan pendirian Persekutuan Komanditer.

Selanjutnya notaris memesankan nama Persekutuan Komanditer sampai memperoleh izin penggunaan nama dari Menteri Hukum dan HAM, menyusun hingga meresmikan akta pendirian Persekutuan Komanditer, menunggu NPWP Persekutuan Komanditer diperoleh oleh para sekutu lalu mendaftarkan seluruh berkas tersebut ke SABH. Notaris mengisikan ke SABH data Persekutuan Komanditer mencakup identitas Persekutuan Komanditer termasuk NPWP Perserkutuan Komanditer, informasi akta pendirian, informasi modal persekutuan komanditer, identitas pribadi sekutu termasuk KTP dan NPWP Pribadi, Informasi

penerima manfaat usaha, konfirmasi pendaftaran, memasukkan foto asli dan salinan akta pendirian, mengunduh surat pendaftaran dari SABH. Apabila Persekutuan Komanditer adalah edisi yang lama sebelum diterbitkan Permenkumham No.17 tahun 2018 maka tidak perlu didaftarkan melainkan cukup dicatatkan dengan memilih Pencatatan.

2. Administrasi Pendirian Perseroan Terbatas yang baru berdasarkan UU 40 tahun 2007 hasil perubahan UU No.11 tahun 2020, adalah dimulai dari calon sekutu mengumpulkan calon nama Perseroan Terbatas minimal dua nama, copy KTP para pendiri dan para pengurus, disertai keterangan siapa para pemegang saham dan berapa lembar saham yang dimiliki juga harga per lembar saham, Copy NPWP Direktur Perseroan Terbatas, Copy bukti setor modal atas saham, Copy keterangan tempat usaha dari Kelurahan setempat, maksud dan tujuan pendirian Perseroan Terbatas, NPWP Perseroan

Kemudian Notaris memesankan nama Perseroan Terbatas sampai memperoleh izin penggunaan nama dari Menteri Hukum dan HAM, menyusun hingga meresmikan akta pendirian Perseroan Terbatas, menunggu NPWP Perseroan Terbatas diperoleh oleh para pendiri lalu mendaftarkan seluruh berkas tadi ke SABH. Pada SABH, Notaris lalu mengisi form pendaftaran Perseroan Terbatas ialah, pertama, terdiri dari Nama, Jenis Perseroan, NPWP Perseroan dan Pribadi Direktur, Jangka Waktu, Alamat beserta

kodepos perseroan, nomor telepon perseroan, maksud dan tujuan Perseroan. Kedua, Akta Notaris isinya Nomor akta dan tanggal akta. Ketiga, Modal Dasar yang terbagi dalam beberapa pemilik dan bagian, penaksiran harga saham perlembar, jumlah lembar per saham, total modal. Keempat, Modal ditempatkan yaitu: klasifikasi bagian, penaksiran bagian per lembar, total modal, saham berbentuk uang dan atau barang tidak bergerak. Kelima, bidang yang menjadi maksud dan tujuan perseroan. Keenam, informasi Pemegang saham diisikan tentang identitas, nomor identitas, pengendali perseroan, NPWP pribadi, alamat, nomor telepon, faximile, email, jumlah penaksiran saham, dan status kepemilikan dari modal-modal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Prosedur administrasi Persekutuan Komanditer sebaiknya tidak diperlakukan hampir sama dengan Perseroan Terbatas karena akan mengurangi minat calon pengusaha untuk mendirikan Persekutuan Komanditer.
2. Prosedur administrasi Perseroan Terbatas sebaiknya tidak banyak peraturan dan perubahan dikarenakan juga akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan lama maupun baru untuk melakukan

langkah bisnis selanjutnya dan berpotensi akan terganggu ketika akan melakukan ekspansi bisnis.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Kadir Muhammad 2003 *Hukum Dagang Berkenaan CV, Firma, Persekutuan Perdata*.

Adrian Sutedi 2015 *Buku Pintar Perseroan Terbatas*

Emmy Simanjuntak Pangaribuan 2005 *Pendirian CV, Firma, Persekutuan Perdata*, Bina Cipta.

Gunawan Widjaja 2008 *Risiko Hukum Pemilik Direksi & Komisaris PT*
Forum Sahabat

Handri Raharjo 2009 *Hukum Perusahaan*.

HMN Purwosutjipto 1999 *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*.

H.M.N. Purwosutjipto 2005 *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2*
(*Bentuk-Bentuk Perusahaan*).

Juliansyah Noor 2011 *Metode Analisis: Skripsi, Disertasi, & Karya Ilmiah*.

Mulhadi 2010 *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan usaha di Indonesia*

Ridwan Khairandy "Perseroan Selaku Organ Hukum" *Jurnal Hukum Bisnis*.

Rudhi Prasetya 2004 *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji 2001 *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*

Soerjono Soekanto 2012 *Pengantar Analisis Hukum*

Yudha Bhakti Ardiwisasta, 2012, *Interpretasi dan Konstruksi Hukum*.

Yusran Hadini, 2013, *Prosedur Dan Tata Proses Pendirian CV*

Berdasarkan KUHD, Graha Ilmu, Jakarta.

Zainal Asikin, 2013, *Hukum Dagang*, Cetakan Pertama, PT RajaGrafindo

Persada, Jakarta.

Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPer)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

UU RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja

Tahun 2020, Tambahan Lembar Negara

Permenkumham RI No 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan

Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.

Penelitian Lainnya

Cut RaishaYannaz 2018 *Analisis Yuridis Terhadap Pembuatan Akta Pendirian CV Tanpa Adanya Persero Komanditer* Tesis Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara.

Dewi Sartika 2021 *Legalitas Pendaftaran Pendirian dan Perubahan Persekutuan Komanditer Pasca Lahirnya Permenkumham 17 Tahun 2018* Tesis Prodi Magister Kenotariatan Program pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utaara.

Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.

Jurnal

Krisnadi Nasution dan Alvin Kurniawan, “Pendaftaran Commanditaire Vennotschap (Cv) Setelah Terbitnya Permenkumham No 17 Tahun 2018”

Sri Rumada Sihite *Analisis Yuridis atas Implementasi Pendaftaran Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennotschap) secara Online Pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 berkenaan Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata (Studi di Kota Medan)* Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2019

internet

Kbbi.web.id